

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara-negara yang sudah maju seperti Amerika, Jepang, Jerman, Prancis, dan Inggris, menjadikan pendidikan sebagai prioritas dan primadona utama dalam rangka meningkatkan kualitas SDM yang nantinya berimbas kepada peningkatan ilmu dan teknologi, ekonomi, dan kemajuan pembangunan bangsanya sehingga disegani oleh bangsa-bangsa lainnya. Komitmen terhadap peningkatan kualitas pada sektor pendidikan menjadi *trademark* mereka. Hal ini terbukti dari setiap kampanye para calon pimpinan negara-negara tersebut yang selalu memprioritaskan pendidikan sebagai pilar pembangunan atau inovasi pembangunan mereka. Hal tersebut membuktikan negara-negara tersebut yang notabene dianggap sudah maju, justru terus semakin maju pesat dalam berbagai sektor, seperti: ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, politik, militer, dan semacamnya.

Banyak negara-negara di Asia seperti Jepang, Korea, China, Taiwan, Hongkong, bahkan Malaysia dan Singapura yang pendidikannya berkiblat ke sana. Kebijakan pemerintahnya meniru negara-negara tersebut, yakni menitikberatkan pembangunannya kepada pembangunan pendidikan karena mereka menganggap bahwa melalui sektor inilah bangsa dan negara bisa berkembang, maju, kompetitif, dan sejahtera bangsanya. Selain itu, harkat dan derajat bangsanya akan terangkat di mata dunia, diperhitungkan, dihormati, disegani, bahkan ditiru bangsa-bangsa lainnya. Ini artinya bahwa negara-negara yang kurang respek dan perhatian terhadap

pendidikan tidak akan mampu bersaing, bahkan akan semakin tertinggal dengan negara-negara lain. Negara-negara tersebut pada akhirnya akan selalau tinggi ketergantungannya pada negara-negara lain dan secara politis akan menjadi permainan bangsa lain yang sudah maju.

Kalau kita mengambil ilustrasi negara-negara yang tergabung dalam perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara (ASEAN), kita merasa cemburu dengan perkembangan dan kemajuan yang mereka raih, baik itu pada tingkat kualitas sumberdaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, eksistensinya di mata dunia, ataupun lobi politik globalnya yang mulai sudah diperhitungkan dunia. Hal ini terjadi sebagai dampak dari perhatian penuh pemerintahnya kepada sektor pendidikan yang menyebabkan SDM mereka berkualitas. Atensi pemerintahnya terhadap sektor pendidikan menjadi skala prioritas di atas pembangunan sektor lainnya. Mereka tidak menjadikan sekala prioritasnya pada pembangunan ekonomi dan pembangunan fisik, tapi mereka lebih menitikberatkan kepada sektor pendidikan yang mampu mencetak SDM yang berkualitas. SDM yang berkualitas mampu membawa bangsanya ke era persaingan global yang begitu kompetitif.

Sebagai ilustrasi dari negara-negara ASEAN yang dianggap sudah lebih maju adalah Malaysia dan Singapura. Ke dua negara tersebut menjadikan sektor pendidikan sebagai kiblatnya pembangunan bangsanya, sektor pendidikan dijadikan sebagai pilar pembangunan, dan sektor pendidikan dijadikan agama bagi pembangunan bangsanya. Hal tersebut terbukti dari perhatian pemerintah yang sangat serius dalam menangani pendidikan, di antaranya dengan mengalokasikan dana dari APBN-nya yang sangat besar. Pada awal merdeka, Malaysia

mengalokasikan dana dari APBN-nya sebesar 35% (1967) dan Singapura mengalokasikan dana dari APBN-nya sebesar 75%. Sungguh sangat luar biasa, sangat prestisius, dan sangat menakjubkan perhatian para pimpinan negara mereka terhadap sektor ini. Sebagai efek langsung adalah mereka maju, sejahtera, kompetitif, dan dihormati oleh bangsa-bangsa lainnya karena mampu menciptakan SDM yang berkualitas yang tak akan kalah dari bangsa-bangsa lainnya, sekalipun dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu maju seperti Eropa dan Amerika Serikat.

Di Indonesia, strategi untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan telah diatur dalam UUD 1945, UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Semua itu seharusnya direalisasikan pada tataran praktis di lapangan sebab pengetahuan tanpa aksi tidak akan berarti apa-apa, dan itu identik dengan adagium Herbert Spencer yakni *the great aim of education is not knowledge, but action*, yakni tujuan besar dari pendidikan bukan hanya pada tataran pengetahuan semata, tapi pada tataran aksi yang nyata. Bukan pada tataran programnya semata, tapi bagaimana aksinya di lapangan yang efeknya berpengaruh besar terhadap kualitas hasil. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang berpihak pada upaya pembentukan SDM yang unggul perlu mendapat respon positif dan dukungan dari berbagai pihak melalui jalinan kerja dan proses yang sinergis dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan. Pemerintah seyogyanya merancang, mengimplementasi, dan mengevaluasi program pendidikannya agar dapat mewujudkan pendidikan yang bermutu (*qualified education*). Selama ini dikesani bahwa pemerintah ingin mendapatkan standar lulusan yang berkualitas

tanpa memberikan standar pelayanan yang terencana dengan baik yakni meningkatkan kualitas pendidik dan perlengkapan/fasilitas pendidikannya.

Kewenangan pemerintah dalam menciptakan program dan standar nasional pendidikan merupakan langkah strategis guna memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Oleh karena itu, melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), pemerintah telah menetapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP yang telah dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 itu memuat: 1) Standar Isi; 2) Standar Proses; 3) Standar Kompetensi Lulusan; 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 5) Standar Sarana dan Prasarana; 6) Standar Pengelolaan; 7) Standar Pembiayaan; dan 8) Standar Penilaian. Walaupun semua itu fokusnya pada pendidikan dasar dan menengah, namun bisa dijadikan acuan bagi sistem pendidikan Tinggi.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, SNP di atas perlu dirancang, disusun, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh lembaga pendidikan secara sistemik dan kontinyu agar menghasilkan suatu program yang mutakhir dengan implementasi yang berkualitas, serta evaluasi yang akurat, sehingga menghasilkan *output* yang handal. Untuk tingkat perguruan tinggi berbeda dengan tingkat pendidikan dasar dan menengah, yakni dirancang, disusun, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh para dosen. Oleh karena itu, setiap dosen harus memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam menyusun program, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran dan hasilnya. Fungsi pengajar kaitannya dengan kurikulum bukan hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai pengadaptasi, pengembang, dan bahkan peneliti. Ini artinya bahwa dosen yang punya komitmen akan kewajibannya, dosen yang

bertanggungjawab, dan dosen yang sadar akan profesinya merupakan karakteristik dosen yang berkualitas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peran, tugas, dan tanggung jawab yang dipikul dosen sangat vital dan berat. Tugas dan tanggung jawab tersebut memerlukan konsentrasi, kompetensi, dan profesionalisme dosen. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dosen sebagai petugas penanggungjawab memperoleh penghargaan dan perhatian khusus dari pemerintah, baik peningkatan kompetensi dan profesionalisme, maupun peningkatan lainnya yang berpihak pada dosen dan kepentingan pencapaian tujuan pendidikan nasional, misalnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan, dan sebagainya. Tuntutan akan kualitas kompetensi dan profesionalisme dosen sangat mendesak, demikian juga penghargaan terhadapnya. Hal tersebut beriringan dengan tuntutan terhadap kualitas *input* dan *output* pendidikan.

Pendidikan di era arus informasi yang begitu cepat, alih teknologi dan bahkan penciptaan teknologi, serta gejolak global seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih istimewa. Hal ini dikarenakan mau tidak mau bangsa ini akan ada di dalamnya dan terpengaruh besar olehnya. Dalam momen tersebut, pemahaman terhadap bahasa Inggris menjadi sangat penting. Tidak bisa ditawar-tawar lagi bahwa posisi bahasa Inggris menjadi sangat urgen dan esensial dalam percaturan dunia informasi, teknologi dan global ini. Semua informasi, mayoritas diinformasikan dalam bahasa Inggris, baik secara tulisan, lisan, maupun bacaan. Oleh karena itu, semua *agregat* bangsa terutama kaum terdidik harus memahami bahasa Inggris, apalagi dosen, guru, para pejabat, pebisnis, teknokrat, dan kaum intelektual lainnya. Hal ini disebabkan bahasa Inggris merupakan bahasa asing utama yang paling relevan

sebagai instrumen operasional dalam mengakomodasi perkembangan IPTEKS dan pasar bebas dunia. Selain itu, dengan adanya arus informasi dan alih teknologi yang begitu cepat, dunia sudah seakan-akan tidak mengenal batas wilayah geografis (*borderless world*), terbukti orang bisa berkomunikasi dengan bebas kapan saja dimana saja, bisa mencari informasi secara cepat tentang apapun yang terjadi di belahan dunia manapun melalui media internet, antena parabola, telepon seluler, dan teknologi canggih lainnya.

Peranan bahasa Inggris di era global, di tengah arus informasi yang begitu cepat, dan di era persaingan ekonomi yang begitu kompetitif, semakin terasa dan besar peranannya. Selain itu, bahasa Inggris hendaknya dilihat pula sebagai alat yang tak bisa dikesampingkan dalam suasana kompetisi dan kerjasama global melalui pemanfaatan IPTEK, perdagangan dan kegiatan interaksi insani lainnya (Hamied, 2003: 12). Signifikansi bahasa Inggris ini akan mulai lebih terasa saat diberlakukannya pasar bebas Asia Tenggara (AFTA) pada tahun 2004, pasar bebas Asia Pasifik (APEC) mulai tahun 2010, dan pasar bebas global (GAT) yang akan dimulai pada tahun 2020. Orang yang tidak mampu berbahasa Inggris akan ketinggalan informasi, ketinggalan ilmu pengetahuan, ketinggalan teknologi dan bahkan ketinggalan secara ekonomi.

Bahasa Inggris sebagai bahasa utama dunia tentu saja digunakan dalam berbagai kegiatan, baik ilmiah ataupun non ilmiah. Oleh karena itu, pemerintah sudah sejak lama memasukan bahasa Inggris ke dalam kurikulum pendidikan dan menjadi salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi, bahkan pelajaran bahasa Inggris termasuk salah satu mata pelajaran yang diujikan pada Ujian Nasional (UN). Ini disebabkan pentingnya pemahaman bahasa

Inggris oleh hampir semua lapisan masyarakat terutama masyarakat terdidik, dalam hal ini siswa atau mahasiswa. Saat ini, pelajaran bahasa Inggris menjadi bagian dari struktur mata pelajaran dalam Standar Isi sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 22 tahun 2006. Hal ini berarti bahwa bahasa Inggris sangat penting untuk dipahami tidak hanya oleh kalangan siswa atau mahasiswa, guru, dan dosen, melainkan juga oleh seluruh komponen bangsa yang merupakan potensi sumber daya manusia Indonesia. Tujuannya adalah sebagai bekal menuju perkenalan dan pergaulan dengan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada umumnya tersaji dalam bahasa Inggris, baik secara langsung melalui komunikasi, maupun tidak langsung yang dapat diakses dari multi media elektronik.

Dewasa ini, bahasa Inggris sudah dikenalkan pada anak-anak usia dini dan anak usia pra-sekolah, bahkan di sekolah dasar sudah menjadi bagian dari kurikulum. Mencermati hal tersebut, perlu kiranya para ahli kependidikan melakukan evaluasi dan pengorganisasian kurikulum yang berlaku pada tiap jenjang pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih substansi materi pada tiap jenjang pendidikan, sehingga tidak terkesan adanya kekacauan program yang terdapat dalam substansi kurikulum maupun silabus. Oleh karena itu, tinjau ulang kurikulum pada tiap jenjang pendidikan perlu dilakukan agar program dan aktivitas pembelajaran bahasa Inggris yang terstandar dan dilakukan secara hirarkis, bertahap berkesinambungan dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Tinjau ulang kurikulum merupakan langkah awal sebelum dilakukan *need analysis* yang pada akhirnya sampai pada taraf revisi dan revitalisasi kurikulum agar siswa atau mahasiswa memiliki kompetensi berwacana bahasa Inggris yang baik, yakni kompeten dalam



menyimak (*listening*), berbicara (*speaking*), membaca (*reading*), dan menulis (*writing*).

Di dunia Perguruan Tinggi (PT) misalnya, kompetensi berwacana mahasiswa dalam bahasa Inggris masih dirasakan kurang. Hal ini menimpa semua *agregat* tersebut dan pada dasarnya disebabkan oleh:

- 1) masih rendahnya motivasi dan minat belajar mahasiswa dalam bahasa Inggris.

Ini disebabkan mereka kurang menyenangi mata kuliah ini. Ketidaksenangannya disebabkan oleh berbagai hal, salah satu diantaranya adalah karena pengalaman awal belajar bahasa Inggris pada jenjang pendidikan sebelumnya tidak didorong dengan motivasi dan minat yang tinggi sehingga mereka kurang memiliki kemampuan apalagi menguasai bahasa Inggris secara aktif, bahkan mata kuliah ini termasuk mata kuliah yang dibenci (Mansyur, 2002: 3). Rendahnya minat mereka dalam belajar bahasa Inggris akan berakibat negatif terhadap kemampuan mereka sendiri, hal ini identik dengan apa yang Wittig (1983: 43) katakan bahwa *no learning no interest*, artinya bahwa tidak akan ada aktivitas belajar tanpa minat. Oleh karena itu, rendahnya minat belajar bahasa Inggris secara otomatis akan berpengaruh langsung kepada pencapaian kompetensi berwacana bahasa Inggris;

- 2) kelemahan kurikulum, artinya bahwa kurikulum yang disusun tidak berdasarkan kepada *need assessment*. Kurikulum yang ada kurang memadai karena terkesan “dipaksa” untuk seragam tanpa memperhitungkan *need assessment* tadi. Kalau kurikulum didisain berdasarkan *need assessment*, maka akan tergambaran kompetensi yang dibutuhkan dan harus dimiliki mahasiswa, jenis materinya, model, strategi, teknik, dan pendekatan pembelajarannya, dan jenis-jenis evaluasi

yang mampu merekam kompetensi berwacana bahasa Inggris mahasiswa secara *integrated*. Kelemahan kurikulum merupakan kesalahan awal yang berakibat sangat fatal, karena ia merupakan akar dari proses pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembelajaran yang berakhir pada *output*, bahkan *outcome*. Oleh karena itu, kurikulum yang terkesan dipaksakan tidak akan membuahkan hasil yang memuaskan, bahkan cenderung akan membingungkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaannya, baik dosen lebih-lebih mahasiswa karena tidak sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, dan proses perumusan kurikulumnya pun tidak melibatkan elemen terkait yang kompeten; sedangkan kurikulum dituntut harus mampu mengantarkan mahasiswa ke arah pencapaian kompetensi yang ideal (*ideal competence*). Tak cukup hanya itu, aspek implementasi di lapangan terutama pada proses pembelajaran sangat menentukan terhadap kualitas *output*. Sehebat atau setangguh apapun kurikulum didisain, tidak akan berpengaruh banyak pada kualitas *output* apabila kualitas prosesnya kurang memuaskan. Oleh karena itu, kualitas proses pembelajaran menentukan kualitas hasil;

- 3) profesionalisme dan tingkat pendidikan dosen yang masih rendah. Tidak sedikit dosen yang memberikan mata kuliah bahasa Inggris bukan berasal dari latar belakang pendidikan bahasa Inggris (*mismatch*). Hal ini merupakan salah satu masalah yang sangat ironis dan perlu segera ditangani, sebab mengajarkan bahasa tidak cukup hanya bermodalkan kebiasaan berbahasa saja (*knowing language*), tetapi juga diperlukan pengetahuan berbahasanya (*knowing about language*). Dengan demikian, maka kegiatan pembelajaran atau perkuliahan harus diselenggarakan dan dikelola secara profesional, atau menempatkan orang pada



Isipainya (*the right man on the right place*). Kalau hal tersebut masih dibiarkan berlangsung, maka akan berakibat fatal bagi sistem pendidikan karena tujuan pembelajaran bahasa Inggris yang tadinya agar mahasiswa mampu berbahasa Inggris, justru akan menjadi kabur. Islam sudah mewanti-wanti hal itu dimana jika sesuatu urusan dipegang bukan oleh ahlinya, maka tunggu saja saat kehancurannya. Penempatan orang untuk mengajar bahasa Inggris sebaiknya dilakukan secara proporsional dan profesional, agar menghasilkan *output* yang kompeten.

Kebiasaan yang kurang kondusif dalam menentukan pengajar atau dosen hendaknya jangan terus dipelihara dan dilestarikan, sebab untuk mencapai tujuan kurikuler atau institusional tidak akan bisa ditempuh hanya dengan cara asal-asalan karena akibatnya akan memproduksi *output* yang asal-asalan pula. Prinsip proporsionalisme dan profesionalisme hendaknya menjadi komitmen bersama guna meningkatkan kualitas pendidikan menuju pencapaian standar mutu yang telah ditetapkan pada kurikulum. Kemampuan berbahasa Inggris saja tidak menjamin seseorang memiliki kemampuan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran bahasa Inggris dengan baik dan benar. Untuk menjadi pengajar bahasa Inggris yang baik, diperlukan mengetahui, memahami, dan memiliki pengalaman dalam mengimplementasikan kurikulum (merencanakan pembelajaran: menyusun silabi dan SAP yang baik, menggunakan metode pembelajaran yang tepat, menggunakan dan memanfaatkan media dan sumber belajar, dan menilai aspek-aspek berbahasa secara tepat); penguasaan materi bahasa Inggris; dan mampu memotivasi mahasiswa.

Selain itu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (2005: 25) pasal 31 ayat 1 poin b menyebutkan bahwa pendidik pada pendidikan tinggi memiliki kualifikasi pendidikan minimum lulusan program Magister (S2) untuk program Sarjana (S1). Melihat hal di atas jelas bahwa pendidikan dosen atau pengajar di tingkat Perguruan Tinggi (PT) seharusnya berpendidikan minimal Strata-2 (S-2) pada bidangnya karena mereka yang diajar adalah mahasiswa program S-1. Idealnya memang seperti itu karena sangat ironis sekali dosen berkualifikasi S1 mengajar pada mahasiswa program S1. Kondisi tersebut masih banyak terjadi hampir di setiap lembaga Pendidikan Tinggi (PT).

- 5) rendahnya *input* mahasiswa menjadi hal yang sangat krusial and urgensi untuk dipikirkan karena ini akan berakibat kurang efektif dalam implementasi kurikulum di lapangan. Animo mahasiswa yang rendah perlu dipikirkan ulang faktor penyebabnya. Hal ini disebabkan akan mengganggu terhadap kualitas *output* yang dihasilkan.
- 6) proses pembelajaran bahasa Inggris yang tidak standar atau tidak maksimal, artinya kompetensi apa yang akan dicapai setelah mata kuliah itu disajikan, kurang jelas arahnya. Hal ini terlihat dari persiapan dosen yang kurang terencana dengan baik ketika dia akan mengajar. Hal ini terlihat dari jarangny membuat Silabus dan SAP yang merupakan kerangka pembelajaran dimana semuanya sangat lengkap tentang apa dan bagaimana materi itu akan disajikan, media apa yang akan digunakan dan termasuk sistem evaluasi dan tugas-tugas yang akan diemban oleh mahasiswanya. Hal tersebut terlihat sangat jelas, runtut dan sistematis.

7) kurangnya sumber daya pendukung, hal ini akan menyebabkan terganjalnya kelancaran program yang dicanangkan sebab hal tersebut tidak kalah pentingnya dalam pencapaian kompetensi yang dicanangkan. Laboratorium bahasa, perpustakaan, lingkungan belajar, dan sarana penunjang lainnya yang sangat vital dan berpengaruh langsung atau tidak langsung dalam proses pembelajaran.

Dari penjelasan di atas, secara umum menunjukkan bahwa kurikulum dan implementasinya dalam pencapaian kompetensi berwacana (*discourse competence*) bahasa Inggris yang selama ini diterapkan telah menciptakan *output* yang memiliki kompetensi rendah. Kompetensi berwacana (*discourse competence*) dimaksudkan sebagai kemampuan berkomunikasi lisan maupun tulisan dalam berbagai peristiwa komunikasi (Alwasilah, 2005: 6). Secara terperinci, kompetensi berwacana ini meliputi kemampuan (*skill*) menyimak (*listening*), berbicara (*speaking*), membaca (*reading*), dan menulis (*writing*).

Data lain menunjukkan bahwa hasil testing para calon mahasiswa yang masuk Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung pada tahun akademik 2005/2006 dalam mata pelajaran bahasa Inggris menunjukkan nilai rata-rata 4,7. Ini membuktikan bahwa kompetensi berbahasa (*language competence*) atau kompetensi berwacana (*discourse competence*) bahasa Inggris dari para peserta testing calon mahasiswa UIN SGD Bandung masih rendah.

Rendahnya kompetensi berwacana dalam bahasa Inggris ini juga dialami oleh para mahasiswa program studi Bahasa dan Sastra Inggris (BSI) yang berada di Fakultas Adab dan Humaniora UIN SGD Bandung yang nota bene merupakan bidang kajiannya. Data menunjukkan bahwa mahasiswa program studi BSI sebelum

ujian komprehensif disyaratkan harus sudah mempunyai skor TOEFL minimal 450 dari lembaga-lembaga yang dilegitimasi program studi. Apa yang terjadi adalah sulitnya para mahasiswa program studi BSI menyentuh skor 450 yang distandarkan oleh program studi BSI walaupun mereka telah 4 tahun belajar di program studi BSI yang nota bene terus-menerus mempelajari bahasa Inggris dengan mendapatkan mata kuliah-mata kuliah yang berhubungan dengan materi tes TOEFL, seperti: mata kuliah *listening* diberikan 10 SKS, *Speaking* 10 SKS, *Reading* 10 SKS, *Writing* 10 SKS dan *Grammar* 10 SKS. Ini dimaksudkan agar mereka benar-benar terampil berbahasa Inggris dan biasa menggunakannya dalam keseharian. Hal ini sesuai dengan pandangan Alwasilah (2000: 2) yang mengatakan bahwa keempat keterampilan bahasa (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis) mengindikasikan tingkat literasi pembelajar (mahasiswa) dalam bahasa Inggris, dan nilai penguasaan keempat keterampilan ini relatif dan bergantung pada tiga variabel, yaitu:

1. Tipe bahasa: Apakah ia sebagai bahasa pertama, kedua, atau ketiga.
2. Keterampilan berbahasa: menyimak, berbicara, membaca, atau menulis.
3. Konteks okupasional: wartawan, penerjemah, pembaca berita TV, editor, dosen, da'i, dsb.

Keempat keterampilan bahasa dalam keseharian kehidupan dan komunikasi memang bukan sesuatu yang ilmiah, tetapi proses pembelajarannya seringkali tidak dilandasi sikap ilmiah, sehingga kualitas literasi kita sangat rendah, baik dalam bahasa Indonesia, Arab, maupun Inggris (Alwasilah, 2000: 3). Ini artinya bahwa rendahnya kemampuan berbahasa Inggris yang terjadi pada mahasiswa BSI menurut

pandangan dia diakibatkan oleh rendahnya kompetensi dosen dan proses pembelajarannya.

Sebagai data lain, dalam studi pendahuluan pada program studi Bahasa dan Sastra Inggris pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN SGD Bandung, ditemukan bahwa usaha pencapaian kompetensi berwacana dalam bahasa Inggris tersebut menghadapi kendala yang kompleks, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

Tabel 1.1
Data Tentatif Keterampilan Berbahasa Mahasiswa
Prodi BSI UIN SGD
(Sampel Mahasiswa 100 orang)

No	Aspek Language Skills	Kualifikasi (%)		
		<i>Mahir</i>	<i>Cukup</i>	<i>Rendah</i>
1	<i>Listening</i> (menyimak)	5	10	75
2	<i>Speaking</i> (berbicara)	15	25	60
3	<i>Reading</i> (membaca)	25	30	45
4	<i>Writing</i> (menulis)	2,5	12,5	85

Berdasarkan laporan evaluasi Prodi BSI pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN SGD (2004:3), *listening* atau menyimak dalam bahasa Inggris dirasakan begitu sulit bagi mayoritas mahasiswa prodi BSI UIN SGD. Hal ini terlihat dari nilai UAS mahasiswa prodi BSI UIN SGD angkatan 2003/2004 dan 2004/2005. Dari 60 mahasiswa program studi BSI adalah angkatan 2003-2004, 40 mahasiswa BSI mendapat nilai UAS *Listening* 3 rata-rata 51-60, padahal mereka sudah mendapat mata kuliah *Listening* 1 sebanyak 4 SKS dan *Listening* 2 juga 4 SKS. Sedangkan dari 72 mahasiswa angkatan 2004-2005, mayoritas hasil UAS *Listening* I mereka berada pada rentang nilai 35-59. Ini menunjukkan bahwa keterampilan menyimak mahasiswa dikategorikan masih rendah.

Kemampuan menyimak (*listening*) mahasiswa prodi BSI juga terlihat sangat kentara pada tahun akademik 2003/2004 saat prodi BSI menghadirkan dosen tamu *native speaker* untuk mengajar. Pada semester ganjil, dosen *native speaker* yang didatangkan adalah *Glen Madden*, sedangkan pada semester genap, dosen *native speaker* yang didatangkan adalah *Nico Joncere*. Berdasarkan laporan evaluasi prodi BSI pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN SGD (2004: 3), dari 100 mahasiswa yang disurvei, 75 responden (75%) masih kesulitan memahami apa yang diucapkan oleh *native speaker*, walaupun kedua *native speaker* tersebut sudah menurunkan kecepatan bicaranya serta mencoba mengulang-ulang kata atau kalimat. Mahasiswa prodi BSI pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN SGD tidak mampu memenuhi prasyarat (indikator) kemampuan menyimak, sebagaimana dirumuskan oleh Murnby dalam Alwasilah (2003:2) sebagai berikut:

- 1) mendengarkan segala kata yang diucapkan penutur, terutama penutur sejati;
- 2) mengerti apa adanya informasi yang diberikan penutur;
- 3) menangkap makna melalui konteks kata-kata dan frase yang tidak diketahui;
- 4) menangkap apa yang tersirat;
- 5) mengerti sikap dan suasana batin penutur;
- 6) mengenal tingkat keformalan (gaya bicara) penutur.

Menurut Alwasilah (2003: 2) pengajaran bahasa Inggris di Indonesia cenderung mengabaikan keterampilan menyimak. Ini berdasar pada alasan-alasan berikut: 1) ada anggapan ihwal sedikitnya kesempatan siswa untuk berkomunikasi langsung dengan penutur sejati, 2) keterampilan membaca jauh lebih penting daripada keterampilan menyimak, dan 3) keengganan para guru untuk menggunakan alat-alat audio-visual, seperti kaset, *tape recorder*, dan *video player*.

Kekurangmampuan mahasiswa prodi BSI dalam menyimak berekuivalen dengan kekurangmampuan mereka dalam keterampilan *speaking* atau berbicara, yakni 65% dari 100 mahasiswa yang disurvei. Yang dimaksud dengan kemampuan *speaking* di sini adalah kemampuan mengekspresikan ide, pikiran, dan perasaan secara lisan dalam bahasa standar. Mulgrave sebagaimana dikutip Tarigan (1996: 7) mengatakan:

Speaking is an instrument in expressing (message) to the listener almost directly whether the listener understands or not, whether the speaker or listener understands the materials or not, and whether the speaker or listener is in control and able to adjust the situation when he is aware and enthusiastic or not.

Kemampuan mengekspresikan ini juga tidak mudah apabila dilakukan dalam bahasa Inggris. Dalam survey pendahuluan pada prodi BSI UIN SGD, ditemukan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kekurangmaksimalan pemerolehan keterampilan *speaking* ini, yakni 1) *pronunciation* (pengucapan); 2) gramatika bahasa Inggris berbeda dengan gramatika bahasa Indonesia, 3) pembendaharaan kosa-kata yang terbatas, 4) kekeliruan dalam pemilihan kosa-kata (*diction*), 5) kurangbiasaan mengungkapkan sesuatu dalam bahasa Inggris, 6) faktor psikologis, yakni kurangberanian atau kurangpercayaan diri berbicara dalam bahasa Inggris, 7) kurangnya mendapatkan dosen *native speaker*, dan 8) faktor lingkungan yang kurang mendukung proses pembiasaan komunikasi sehari-hari dalam bahasa Inggris.

Selanjutnya, kekurangmampuan mahasiswa prodi BSI pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN SGD pun terjadi dalam hal penguasaan keterampilan (*skill*) membaca (*reading*), yakni 45% dari 100 mahasiswa yang disurvei. Padahal, sebagaimana bidang lainnya, *reading* merupakan keterampilan yang mutlak dikuasai oleh setiap mahasiswa prodi BSI agar bisa memahami, mengapresiasi, menceritakan

kembali (*retelling*), menulis kembali (*rewriting*), bahkan mengkritik suatu bacaan (teks) secara komprehensif. Bahkan modal utama untuk menjadi seorang penulis (*writer*) yang produktif adalah pembaca yang baik (*good reader* karena membaca bisa meningkatkan pengetahuan atau membuatnya berpengetahuan (*knowledgeable*).

Domain lain dari *language skills* adalah *writing* atau menulis. Keterampilan inilah yang paling sulit dikuasai oleh mahasiswa prodi BSI pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN SGD. 85% dari 100 mahasiswa yang disurvei mengalami kesulitan yang berarti dalam menulis bahasa Inggris. Ini karena *writing* merupakan keterampilan yang dianggap paling kompleks. Keterampilan *writing* ini membutuhkan keterampilan berbahasa sebelumnya yakni menyimak, berbicara, dan membaca serta pemahaman aturan bahasa Inggris (*grammar*). Seorang penulis harus: 1) berpengetahuan (*knowledgeable*), kuncinya terbiasa membaca; mendengarkan seminar atau *workshop*, diskusi, dan sebagainya karena menulis merupakan *thinking process* dan itu syaratnya *knowledgeable*; 2) mampu mengorganisir pikiran dan idenya supaya koheren dan kohesif dalam tulisan; 3) penguasaan *grammar* dan aplikasinya dalam menulis; 4) kaya kosa kata dan menggunakannya yang tepat makna; dan 5) menggunakan aspek mekanik yang tepat seperti penggunaan tanda baca, ejaan, dan penggunaan huruf besar. Cohen (1994:328-329) mengatakan bahwa aspek-aspek menulis yang bisa diukur adalah:

1. *Content: main ideas stated clearly and accurately, chance of opinion very clear.*
2. *Organization: coherent and logical.*
3. *Vocabulary: choices of words, use of idioms, and word forms.*
4. *Grammar: control of structure.*
5. *Mechanics: mastery of spelling and punctuation.*

Berdasarkan pendapat di atas, menulis terdiri atas lima aspek, yakni: isi, organisasi, kosa kata, grammatika, dan mekanik. Aspek *pertama* adalah isi (*content*), yakni substansi tulisan, ide-ide yang diungkapkan, pengetahuan atau kognitif. Dalam aspek ini, isi atau pengetahuan merupakan aspek atau syarat utama untuk terampil menulis, artinya bahwa syarat mutlak dan utama untuk menjadi seorang penulis adalah berpengetahuan. *Kedua*, organisasi tulisan (*organization*), yakni ide-ide terekspresikan secara runtut (*coherent*) atau terorganisasi secara baik (*well organized*). Ungkapan rasa, ungkapan ide dan ungkapan jiwa harus diekspresikan dalam kalimat-kalimat yang runtut, tidak loncat-loncat (*sudden jump*) dan itu menjadi syarat mutlak dalam menulis yang baik. *Ketiga* adalah kosa kata (*vocabulary*) yakni pembendaharaan kosa kata (*vocabulary enrichment*) dan diksi (*diction*) yang menjadi syarat penting menjadi seorang penulis. Kekayaan kosakata dan pengetahuan akan kosa kata menjadi aspek yang sangat penting karena ini merupakan gambaran utama terhadap penguasaan bahasa. *Keempat* adalah tatabahasa (*grammar*), yakni bagaimana ide-ide tersebut bisa diungkapkan secara baik, dengan bantuan alat, yakni tatabahasa. Penggunaan tatabahasa pada tulisan formal atau tulisan ilmiah mutlak harus digunakan karena ini akan menggambarkan tingkat pendidikan, penguasaan bahasa, dan kebiasaan membaca dan menulis seseorang. *Kelima* adalah mekanik (*mechanics*), artinya bahwa di dalam menulis perlu memperhatikan tanda baca, ejaan, dan penggunaan hurup besar. Penggunaan tanda baca, ejaan, dan penggunaan hurup besar tidak bisa dikesampingkan dalam menulis karena selain mengandung arti, juga merupakan aturan menulis baku dan pada ujung-ujungnya menggambarkan kualitas penulis.

Berdasarkan hal di atas bahwa menulis merupakan keterampilan yang paling sulit dan kompleks. Hal ini identik dengan apa yang dikatakan Tyner (1985:5) bahwa "*writing is becoming difficult because writing is a thinking process*". Sedangkan Hughey (1983:5) mengatakan bahwa "*writing is a complex activity and people do not inherently pass it.*" Problema menulis bahasa Inggris sendiri menurut Mansyur (2001: 120) terdiri atas *cognitive, psychological, linguistic and native language aspect*. Problema menulis dalam bahasa Inggris dalam aspek kognitif dalam arti harus berpengetahuan, psikologis dalam arti keberanian dan kebiasaan menulis dalam bahasa Inggris, linguistik dalam arti penggunaan kata yang tepat makna dan aturan berbahasa yang standar, dan pengaruh bahasa asli dalam arti pola berfikir dan struktur bahasa asli mempengaruhi terhadap tulisan dalam bahasa Inggris. Hal ini juga didukung hasil penelitian Alwasilah (1977: 119) yang menggambarkan bahwa kebanyakan mahasiswa Indonesia di Amerika mempunyai kesulitan yang signifikan dalam menulis makalah atau laporan ilmiah lainnya. Penelitian Fisher dalam Mukminatun (1991: 1) menyebutkan bahwa dari 73 mahasiswa di USA yang disurvei, 8 di antaranya dari Indonesia, hanya 12 orang saja, dan salah satu di antaranya mahasiswa Indonesia, yang menemui kemajuan setelah 1 tahun belajar *writing course*, tapi peningkatannya pun dianggap tidak signifikan.

Berdasarkan hal tersebut, para mahasiswa Program studi BSI pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN SGD Bandung harus kompeten dalam berbahasa Inggris, oleh karena itu, mereka terlebih dulu harus diajarkan kompetensi berwacana bahasa Inggris (*language courses*) secara efektif dan komprehensif sebelum mempelajari materi-materi linguistik (*linguistics courses*) dan sastra Inggris (*literature courses*).

Ini disebabkan kompetensi berwacana bisa menjadi fondasi kuat untuk mempelajari linguistik dan sastra Inggris. Selain itu, ciri khas mahasiswa program studi BSI adalah terampil menggunakan bahasa, terutama *speaking* dan *writing* sebab kedua keterampilan inilah yang bisa diukur kemampuannya oleh masyarakat, terutama oleh masyarakat pengguna. Kompetensi berwacana dalam bahasa Inggris ini juga nantinya akan menjadi bekal bagi mereka ketika memasuki dunia kerja karena *output* yang *skillful* berbahasa Inggris akan sangat dibutuhkan pasar (*market*) atau pengguna (*user*).

Pencapaian kompetensi berwacana dalam bahasa Inggris ini merupakan dasar bagi pencapaian kompetensi lainnya, misalnya mahasiswa pada semester selanjutnya diberikan berbagai mata kuliah tentang linguistik dan sastra Inggris. Untuk memahami karya sastra, seseorang harus terbiasa membaca karya sastra, mengapresiasi dan membaca kritik sastra. Ia tidak akan mampu menulis karya sastra kalau tidak terbiasa membaca, mendengarkan, atau melakukan kegiatan menulis. Jadi, kompetensi berwacana merupakan dasar bagi pemahaman, pendalaman, dan penguasaan linguistik dan sastra. Selain itu, kompetensi berwacana juga bermanfaat ketika orang mau bekerja. Tanpa kompetensi berwacana bahasa Inggris yang baik, *output* program studi akan kesulitan mendapatkan pekerjaan pada institusi-institusi/instansi-instansi/perusahaan-perusahaan yang mengandalkan kompetensi berwacana ini, sebut saja bagian korespondensi bahasa Inggris, penerjemahan tertulis, lisan, membaca perkembangan situasi ekonomi, politik, budaya, dan militer di situs-situs internasional, pengajar bahasa, peneliti bahasa, dan sebagainya.

Untuk itu diperlukan revitalisasi pengembangan kurikulum program studi BSI, khususnya pada domain kurikulum inti prodi yang nantinya mengarah kepada



kompetensi utama, yakni pada tataran *language courses*, *linguistic courses*, ataupun pada *literature courses*. Secara makro, upaya untuk mencapai kompetensi berwacana dalam bahasa Inggris yang *integrated* pada prodi BSI ini diwujudkan lewat kebijakan Menteri Agama Republik Indonesia melalui pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 353 pada tanggal 6 Juli 2004. Dasar pemikirannya adalah: 1) beragamnya potensi peserta didik yang harus dikelola secara beragam, tepat, dan komprehensif; 2) kondisi pendidikan di Indonesia menghasilkan mutu pendidikan yang rendah dan mengabaikan aspek moral, akhlak, budi pekerti, seni dan olah raga, serta *lifeskill*; 3) *output* PTAI harus kompeten dalam bidang keilmuan agama Islam serta bidang keahlian, terutama dalam menghadapi pasar bebas dunia; 4) kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan 5) persaingan lembaga pendidikan (Depdiknas, 2003: 1).

KBK yang dimaksud oleh SK Menag RI sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 45/U/2002, yakni seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu (Kepmendiknas No. 45/U/2002). Dalam konteks pendidikan, Depdiknas (2003: 2) menyebutkan bahwa Pendidikan Berbasis Kompetensi dimaksudkan sebagai bentuk pendidikan yang diselenggarakan untuk menyiapkan lulusannya menguasai seperangkat kompetensi yang bermanfaat bagi kehidupan kelak.

Namun demikian, pemberlakuan KBK di PTAI selama ini, termasuk salah satunya pada Prodi BSI ini, belum disertai oleh langkah-langkah administratif dan akademik lebih lanjut, bahkan belum mengikuti langkah-langkah pengembangan

kurikulum, yakni 1) mengidentifikasi kebutuhan pendidikan, 2) menganalisis kebutuhan pendidikan, 3) menyusun desain kurikulum, 4) mengvalidasi kurikulum, 5) mengimplementasi kurikulum, 6) mengevaluasi kurikulum (Sukmadinata, 2004: 93).

Berdasarkan tahapan-tahapan pengembangan kurikulum, dan melihat berbagai persoalan dalam kompetensi berwacana bahasa Inggris, nampaknya diperlukan jalan keluarnya untuk mengantisipasi segala masalah dan kesulitan yang ada. Salah satu jalan keluarnya adalah pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan.

Berdasarkan masalah-masalah di atas, penelitian ini akan berfokus pada pengembangan kurikulum prodi BSI pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN SGD Bandung. Secara khusus, pengembangan kurikulum ditujukan untuk peningkatan *discourse competence*. Terdapat beberapa alasan mendasar dalam pemilihan objek penelitian ini, yaitu: *pertama*, persoalan peningkatan kompetensi *output* prodi ini merupakan persoalan *esensial* karena wujud kemampuan berbahasa Inggris adalah mampu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Inggris; *kedua*, persoalan peningkatan kompetensi *output* prodi ini merupakan persoalan *crusial* karena kebutuhan pasar akan tenaga kerja adalah mereka yang terampil berbahasa Inggris; dan *ketiga* persoalan peningkatan kompetensi *output* prodi ini merupakan persoalan *meaningful* karena akan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, bukan hanya bagi kalangan yang bergelut di dunia pendidikan, tapi juga bagi kalangan penentu kebijakan. Lebih jauh lagi, kurikulum program studi dituntut untuk bisa menjawab berbagai persoalan di masa kini dan masa depan. Seiring dengan semakin pesatnya globalisasi dan arus informasi, maka semua elemen yang berkaitan dengan

kurikulum mesti serba praktis dan *applicable*, tapi tetap fleksibel dan berwawasan ke depan.

B. PERUMUSAN DAN PEMBATASAN MASALAH

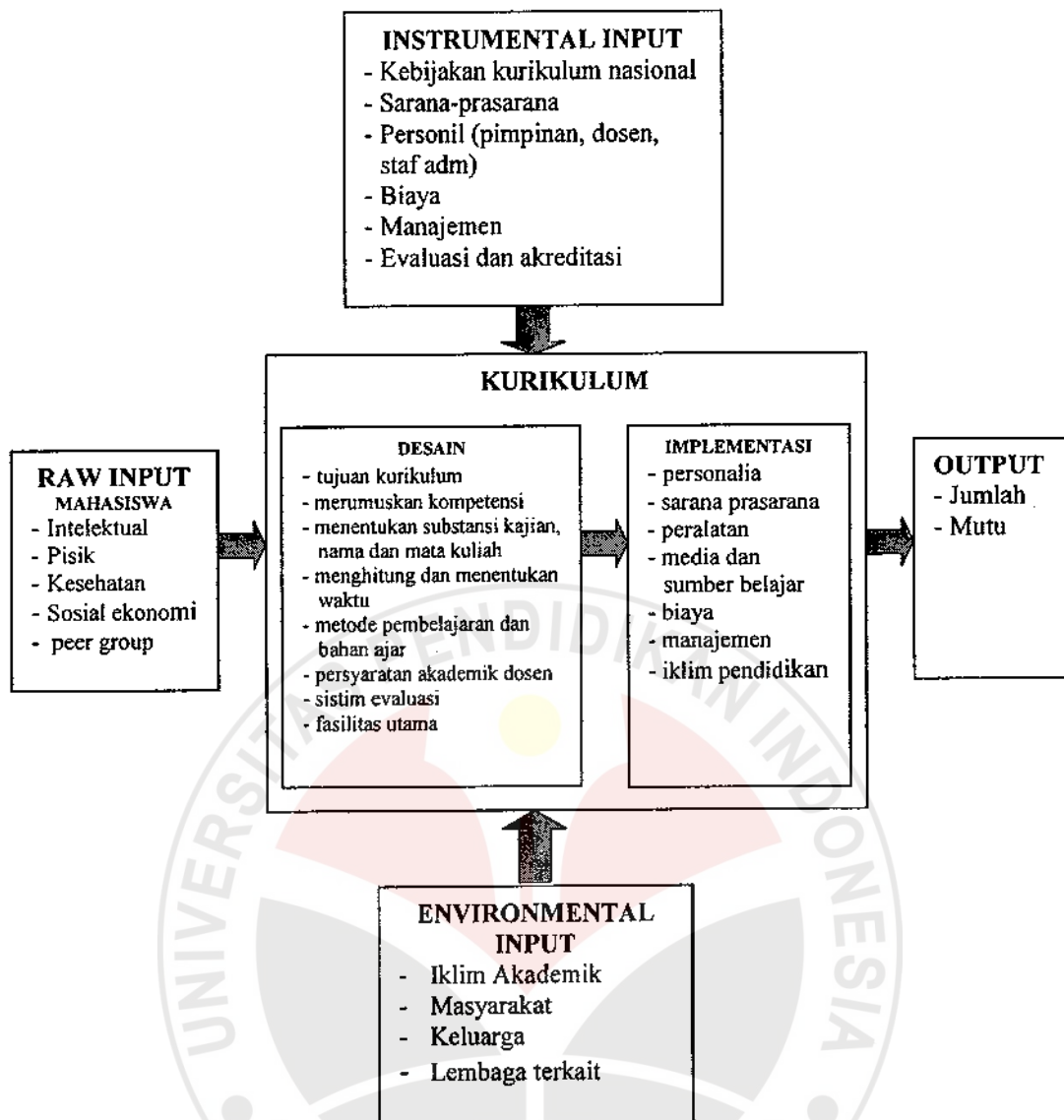
1. Perumusan Masalah

Sebagaimana disebutkan di atas, kebijakan pemerintah yang memberlakukan KBK pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), baik Negeri (PTAIN) atau swasta (PTAIS) belum disertai dengan rumusan disainnya melalui contoh misalnya. Kebijakan tersebut seakan dipaksakan disebabkan tidak adanya atau tidak jelasnya kurikulum dilihat dari komponen tujuan, isi, media/strategi pembelajaran, dan evaluasi, yang ada hanya tujuan PTAI serta kompetensi yang diinginkan PTAI. Hal ini justru yang membuat para pengelola lembaga (PTAIN=UIN, IAIN, STAIN, dan PTAIS) menjadi limbung. Seharusnya dibuat rumusannya berdasarkan komponen kurikulum sebagaimana telah disebutkan di atas secara rinci dalam contoh kurikulum suatu prodi yang ada di lingkungan PTAI sehingga bisa dijadikan contoh untuk merumuskan rancangan kurikulum prodi, termasuk kurikulum prodi Bahasa dan Sastra Inggris (BSI). Perumusan disain kurikulum seharusnya melibatkan berbagai khalayak yang kompeten dan berkepentingan: mahasiswa, dosen, alumni, pengguna (*user*), tim ahli, yang mempunyai kebijakan, dan yang berkepentingan lainnya (*stakeholders*). Tidak bisa suatu kurikulum prodi dirancang hanya berdasarkan ilmu semata atau di belakang meja semata karena kegiatan *esensial* dalam perencanaan kurikulum adalah melakukan penilaian kebutuhan (*need assessment*). Penilaian kebutuhan ini sendiri merupakan prosedur untuk mengidentifikasi kesenjangan yang muncul sebagai akibat dari adanya perbedaan antara realitas dan keinginan. Hal ini

sesuai dengan pendapat Oliva dalam Hamalik (2002: 25) bahwa macam-macam kebutuhan yang perlu diukur meliputi: kebutuhan siswa, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan *subject matter*.

Dalam pendidikan, kurikulum merupakan fondasi yang memungkinkan sistem bekerja karena kurikulum merupakan kerangka sekaligus ruh pendidikan. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus dilakukan secara matang dan terencana. Beberapa kegiatan yang ada dalam pengembangan kurikulum bisa dikaji dan dilakukan secara luas, yaitu meliputi identifikasi/analisis kebutuhan, penyusunan desain kurikulum, ujicoba, validasi, implementasi, dan evaluasi kurikulum.

Oleh karena itu, untuk meninjau ulang suatu kurikulum diperlukan apa yang disebut dengan pengembangan kurikulum. Setiap pengembangan kurikulum tersebut mempunyai karakteristik tertentu. Pengembangan yang nantinya akan diimplementasikan harus mempertimbangkan *raw input* (mahasiswa), *instrumental input*, dan *environmental input* yang akan tergambar pada tujuan umum dan khusus yang akan dirancang untuk mendesain kurikulum, mengimplementasikan kurikulum, menentukan model-model pembelajaran, dan proses evaluasi dalam rangka meningkatkan kompetensi *output* baik mutu ataupun jumlah. Tujuan umum dan khusus yang akan dirancang untuk mendesain kurikulum, model-model pembelajaran, dan proses evaluasi, didasarkan kepada dukungan penelitian, pendapat kalangan profesional, masyarakat pengguna, dan pelajar/mahasiswa. Untuk lebih jelasnya hal tersebut bisa dilihat pada gambar di bawah ini:

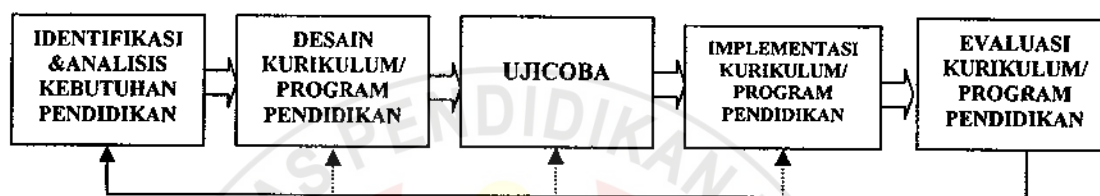


Gambar 1.1
Proses Pendidikan dan Komponen Pendukungnya

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi kajian pada studi tentang pengembangan kurikulum Prodi Bahasa dan Sastra Inggris (BSI) pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN SGD Bandung. Hal ini berangkat dari berbagai hasil kajian yang menggambarkan bahwa hal tersebut mempunyai kelebihan-kelebihan, baik secara konseptual maupun secara empiris dibandingkan dengan yang lainnya, karena

kurikulum berdasarkan kompetensi berisikan sejumlah kompetensi yang menjadi sasaran belajar. Adapun langkah-langkah pengembangan kurikulum, yakni 1) mengidentifikasi kebutuhan pendidikan, 2) menganalisis kebutuhan pendidikan, 3) menyusun desain kurikulum, 4) mengvalidasi kurikulum, 5) mengimplementasi kurikulum, 6) mengevaluasi kurikulum (Sukmadinata, 2004: 93). Hal tersebut lebih jelasnya digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.2
Langkah-langkah Pengembangan Kurikulum

C. PERTANYAAN PENELITIAN

Dari rumusan dan pembatasan masalah, dapat diketahui ruang lingkup masalah yang akan dikaji adalah pengembangan kurikulum Prodi BSI pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN SGD Bandung. Selanjutnya, agar penelitian ini lebih terarah kepada masalah yang dituju, maka akan diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi objektif kurikulum pada prodi Bahasa dan Sastra Inggris (BSI) Fakultas Adab dan Humaniora UIN SGD Bandung yang ada saat ini?
2. Bagaimanakah sosok kurikulum prodi BSI pada Fakultas Adab UIN SGD Bandung yang dikembangkan?

3. Bagaimanakah hasil implementasi kurikulum yang telah dikembangkan prodi BSI pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN SGD Bandung?
4. Apa keunggulan dan keterbatasan yang ditemukan berkaitan dengan implementasi kurikulum yang dikembangkan prodi BSI pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN SGD Bandung?

D. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam rencana penelitian ini, terdapat beberapa peristilahan yang berkaitan dengan topik dan judul penelitian yang dituangkan dalam perumusan dan pembatasan masalah. Peristilahan ini masih perlu diberikan pengertian secara operasional. Hal ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dan memudahkan pemahaman terhadap ungkapan-ungkapan yang dimaksud. Adapun definisi operasional masing-masing peristilahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kurikulum

Istilah “pengembangan” dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai “usaha sistematis, terencana, metodologis, dan komprehensif dengan tujuan untuk mengkritisi, memperbaharui, dan menyempurnakan sesuatu yang telah ada sebelumnya” Gopper dan Ross dalam Hamalik (2000). Mengenai definisi kurikulum, Oliva (1997:12) mengatakan “*Curriculum itself is a construct or concept, a verbalization of an extremely complex idea or set of ideas.*”

Dari pengertian mengenai pengembangan dan kurikulum, maka yang dimaksud dengan “pengembangan kurikulum,” dalam penelitian ini adalah “usaha terencana, sistematis, metodologis, dan komprehensif yang ditujukan untuk mengkritisi, memperbaharui, dan menyempurnakan kurikulum yang telah ada

sebelumnya, yang dalam konteks khusus difokuskan pada pengembangan kurikulum prodi BSI Fakultas Adab dan Humaniora UIN SGD Bandung.

2. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) lahir dari model kurikulum teknologi yang merupakan suatu model kurikulum yang memfokuskan tujuannya pada penguasaan kemampuan atau kompetensi-kompetensi khusus. Kompetensi-kompetensi umum yang dituntut dikuasai dalam suatu sub, diuraikan menjadi kompetensi khusus atau sub-kompetensi dan bahkan menjadi sub-sub kompetensi atau performansi.

Yang dimaksud kompetensi, menurut McAshan dalam Sihono (1997: 69), adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperoleh seseorang, yang telah menjadi bagian dari dirinya di mana ia dapat melakukan dengan baik perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor (*the knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieves, which become part of his or her being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective, and psychomotor behavior*). Sedangkan Crunkilton (1988:6) mendefinisikan kompetensi sebagai tugas-tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang dianggap kritis untuk keberhasilan ketenagakerjaan. Jadi, kompetensi yang dimaksud dalam penelitian adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki oleh semua pelaku pendidikan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, semuanya harus dikuasai dan dijadikan acuan dalam menyusun kurikulum.

Pengembangan kurikulum prodi BSI berbasis kompetensi adalah upaya terencana, sistematis, metodologis, dan komprehensif dengan tujuan untuk mengkritisi, memperbaharui, dan menyempurnakan kurikulum yang dilakukan oleh penyusun atau pengembang kurikulum melalui aktivitas evaluasi kurikulum, analisis kurikulum, identifikasi dan analisis kebutuhan (*need assessment*), desain kurikulum, uji coba kurikulum, implementasi kurikulum, evaluasi kurikulum dan penetapan kurikulum yang difokuskan pada pengembangan KBK pada Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris (BSI) Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.

Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris (BSI) merupakan salah satu program studi yang ada di Fakultas Adab/Ilmu Budaya/Humaniora atau Fakultas Adab dan Humaniora yang baru ada di beberapa Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) tersebar di seluruh Indonesia. Program studi ini merupakan salah satu program studi umum yang ada di beberapa PTAI yang berdiri melalui program *wider mandate* antara Departemen Agama dengan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Ijin operasional program studi ini awalnya dari SK Dirjen Binbaga Islam tahun 1998 kemudian mendapat ijin operasional dari Diknas tahun 2004.

3. Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)

Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) merupakan lembaga pendidikan tinggi yang bernapaskan Islam yang bernaung di bawah Departemen Agama. Perguruan Tinggi Agama Islam terdiri atas Negeri (PTAIN) yang berjumlah 48 buah dan ratusan swasta (PTAIS) tersebar di seluruh jagat Indonesia.

E. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan kurikulum program studi BSI pada Fakultas Adab UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis kondisi objektif kurikulum prodi BSI Fakultas Adab dan Humaniora UIN SGD Bandung.
- b. Menghasilkan kurikulum program studi BSI pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN SGD Bandung.
- c. Melihat hasil implementasi kurikulum yang telah dikembangkan prodi BSI pada Fakultas Adab dan Humaniora Fakultas Adab UIN SGD Bandung.
- d. Menganalisis keunggulan dan keterbatasan yang ditemukan berkaitan dengan implementasi kurikulum yang telah dikembangkan prodi BSI pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN SGD Bandung.

F. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoretis

Pengembangan kurikulum pada dasarnya untuk meninjau ulang kurikulum yang diberlakukan dilihat dari sisi kelemahan, kekurangan, hambatan-hambatannya, serta keunggulannya. Pengembangan kurikulum pada dasarnya harus mengevaluasi komponen-komponen yang ada dalam kurikulum itu sendiri, yakni komponen tujuan, isi, media/metode pembelajaran, dan sistem evaluasinya, karena untuk tujuan apapun pengembangan kurikulum itu dilakukan pada dasarnya memiliki kontribusi tinggi

terhadap pencapaian tujuan program studi yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Atas dasar itu, kurikulum yang diterapkan pada program studi BSI pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati Bandung perlu terus-menerus dikaji efektivitas dan efisiensinya untuk mengetahui apakah kurikulum tersebut perlu disempurnakan atau diperbaiki, dikembangkan atau ditinggalkan.

Secara teoritis, manfaat hasil penelitian ini diharapkan memberikan implikasi teoretis dalam kajian pengembangan kurikulum, baik kurikulum dalam cakupan yang luas (*macro-curriculum*) maupun dalam cakupannya yang sempit (*micro-curriculum*).

2. Manfaat Praktis

Implikasi praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para pengembang kurikulum di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) khususnya, dan umumnya Perguruan Tinggi Umum (PTU) dan Departemen terkait yang membawahi bidang pendidikan dalam memahami pengembangan kurikulum berdasarkan kompetensi dan dalam rangka menerapkannya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para perencana program dalam memahami konsep pendekatan kompetensi serta penerapan konsep tersebut dalam kegiatan pembelajaran pada program studi BSI di PTAI. Sebagai dasar pertimbangannya adalah karena pendekatan berdasarkan kompetensi, baik secara teoritik maupun empirik, terbukti dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai dengan kebutuhannya.

Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat dijadikan sebagai contoh atau embrio bagi program studi lain di UIN SGD Bandung khususnya, dan PTAI umumnya baik PTAIN atau PTAIS dalam mengembangkan dan menerapkan kurikulum program studi berdasarkan kompetensi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Bagi pimpinan institusi PTAI, khususnya pada program studi BSI, hasil penelitian ini merupakan bahan informasi yang dapat dipercaya dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang menyangkut pengembangan dan penerapan desain kurikulum program studi berdasarkan kompetensi ini dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan seluruh kegiatan akademik.

Bagi program studi Pengembangan Kurikulum, Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengembangkan kurikulum program studi yang *applicable* dalam praktek-praktek pengembangan kurikulum di lapangan. Ini disebabkan prosedur pengembangan kurikulum yang praktis, efisien dan efektif, dengan tanpa meninggalkan aspek-aspek ilmiah, sangat dibutuhkan di lapangan.